Kolaps Di Turki, Bagaimana Di Indonesia?

Tanggal	: Rabu , 28 April 2021
Media	: Bisnis Indonesia
Halaman	: 22
Wartawan	: Asteria Desi K
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Faruk Fatih Ozer *(Chief Executive Officer Thodex)*, Recep Tayyip Erdogan *(Presiden Turki)*, Cemil Ertem *(penasihat ekonomi senior untuk Erdogan)*, Oguz Evren Kilic *(seorang pengacara yang mewakili pengguna Thodex)*, Oham Dunggio *(Chairman Asosiasi Blockchain Indonesia)*, Wahyu Laksono *(Founder Traderindo.com)*, Oscar Darmawan *(CEO Bitcoin Indonesia)*, Sidharta Utama *(Kepala Bappebti)*
Rubrik	: Investasi
Topik	: Kripto



| BURSA *CRYPTOCURRENCY* |

KOLAPS DI TURKI, BAGAIMANA DI INDONESIA?

Kasus kolapsnya bursa aset kripto di Turki, Thodex, menjadi fenomena tersendiri di pasar *cryptocurrency* global. Bagaimana regulasinya di Indonesia?

Asteria Desi K.
asteria.desi@bisnis.com

Salah satu bursa pertukaran mata uang kripto terbesar di Turki yakni Thodex, menyatakan tidak mampu untuk melanjutkan operasionalnya, setelah pendirinya membawa kabur aset nasabahnya.

Kondisi tersebut membuat ratusan ribu investor khawatir dana mereka lenyap. Apalagi, pihak berwenang Turki juga sedang berupaya mencari pendiri Thodex yang melarikan diri dari negara tersebut.

Seperti dilansir *Bloomberg*, Jumat (23/4), fenomena tersebut memunculkan kebingungan akan berapa banyak nasabah Thodex yang terpengaruh serta berapa banyak uang yang telah hilang.

Sementara itu, Chief Executive Officer Thodex Faruk Fatih Ozer berjanji untuk mengembalikan uang investor dan kembali ke Turki untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemerintah juga telah memblokir rekening perusahaan dan menggerebek kantor pusatnya di Istanbul.

Adapun kerugian ditaksir mencapai US$2 miliar, menurut surat kabar *Haberturk*. Selain itu, pengacara para korban mengatakan uang yang diinvestasikan oleh sekitar 390.000 pengguna aktif menjadi tidak dapat diambil kembali.

Namun, kedua angka tersebut telah dibantah oleh Ozer. Menurutnya, hanya 30.000 nasabah yang asetnya terdampak.

Sementara itu, pihak berwenang dan nasabah mencoba mencari tahu detail kejadian. Di sisi lain, penasihat senior Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan regulasi cepat dari pasar kripto.

"Pemerintah Turki harus mengambil tindakan secepat mungkin. Skema piramida sedang dibuat. Turki niscaya akan melaksanakan peraturan yang sejalan dengan ekonomi-nya, tetapi juga dengan mengikuti perkembangan global," kata Cemil Ertem, penasihat ekonomi senior untuk Erdogan, seperti dilansir *Bloomberg*, Jumat (23/4).

Sebagai informasi, Thodex adalah bagian dari ledakan tren *cryptocurrency* yang telah menarik banyak minat warga Turki. Banyak warga negara tersebut berupaya melindungi dana mereka dari inflasi yang meningkat dan pergerakan mata uang yang tidak stabil.

Inflasi mencapai 16,2% pada Maret, lebih dari tiga kali lipat dari target bank sentral sebesar 5%. Sementara itu, nilai tukar lira Turki telah melemah 10% terhadap dolar AS, tahun ini.

Menurut data dari *coingecko.com*, pada pertengahan April, volume perdagangan di pasar kripto Turki naik tiga kali lipat menjadi lebih dari US$1,2 miliar dari pekan sebelumnya.

Adapun, regulasi di Turki cukup longgar bagi badan usaha untuk mendirikan bursa penukaran mata uang kripto.

"Di sini, seseorang dapat membangun pertukaran kripto hanya dengan modal 50.000 lira (sekitar US$6.000)," kata Oguz Evren Kilic, seorang pengacara yang mewakili pengguna Thodex.

Fenomena melejitnya Thodex di masyarakat Turki bermula pada bulan lalu. Thodex juga menawarkan iming-iming jutaan Dogecoin gratis kepada pendaftar baru.



Antara/Hafidz Akbar

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi (*kiri*) berbincang dengan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (kanan) dalam mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/3/2021).

Seperti dilansir dari laman resminya, 4 juta koin diklaim telah didistribusikan ke pengguna baru, meskipun banyak orang di media sosial mengeluhkan bahwa mereka tidak pernah menerimanya.

Berkaca dari permasalahan tersebut, mitigasi risiko menjadi salah satu kunci penting untuk mendirikan bursa mata uang kripto di Indonesia. Apalagi, di Indonesia, popularitas mata uang kripto juga tengah naik daun.

Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) menyampaikan investasi dengan aset digital seperti Bitcoin mengalami peningkatan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penyebaran aset kripto yang lebih cepat di negara berkembang, termasuk Indonesia, dibandingkan dengan negara maju.

ABI mencatat adanya peningkatan investor institusional yang mulai menggunakan aset digital sebagai alat investasi yang sah dan dapat dipercaya, serta para pelaku industri yang turut mengembangkan layanan aset digital, terutama Bitcoin.

Oham Dunggio, Chairman ABI, mengatakan perkembangan aset kripto di Indonesia yang signifikan ditopang oleh regulasi yang mendukung investasi di aset kripto. Hal ini karena aset kripto telah diklasifikasi sebagai komoditas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

"Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan hal ini sebagai investasi. Namun, perlu dipahami bahwa investasi juga memiliki risiko, sehingga masyarakat harus membaca lebih dahulu tentang aset kripto termasuk faktor untung dan rugi," tuturnya dalam keterangan resmi, Kamis (22/4).

> **Namun, perlu dipahami bahwa investasi juga memiliki risiko, sehingga masyarakat harus membaca lebih dahulu tentang aset kripto termasuk faktor untung dan rugi.**

ABI mencatat sedikitnya ada delapan bursa pedagang aset kripto yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Mereka adalah Luno, Rekeningku, Indodax, Bitocto, Zipmex, Pintu, Upbit, dan Digital Exchange Indonesia.

PENGUATAN REGULASI

Founder *Tradertrade.com* Wahyu Laksono mengatakan dengan populernya aset kripto, maka perlu diperkuat regulasi yang mengakomodasi aspek keamanan bagi para investor. Terlebih, pemerintah sedang mengupayakan adanya bursa berjangka khusus untuk aset kripto.

Seperti diketahui, pemberntukan bursa berjangka untuk aset kripto telah mendapatkan lampu hijau dari Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Bahkan, kedua wakil menteri ini telah bertemu dan secara khusus membahas rencana pendirian pasar kripto.

Menurut Wahyu, pemerintah harus memperhatikan pengawasan bursa kripto nantinya. Regulasi yang ada, lanjutnya, harus menjelaskan dan mengatur siapa yang akan menjadi pialang. Hal tersebut menjadi kunci penting agar bursa berjangka aset kripto dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu, terkait dengan peristiwa kolapsnya bursa penukaran mata uang kripto di Turki, Wahyu menilai sejak awal memang ada yang tidak beres dengan Thodex.

"Bukan aset kripto namanya kalau bisa dibawa kabur. [Dugaan saya] itu uang *cash* atau uang di bank yang dibawa kabur. Tidak beda sama kejadian *scam* dan ini bukan cuma masalah legal ilegal, resmi atau bodong," tambahnya.

Untuk itu, Wahyu berpendapat perlu dibentuk regulasi khusus yang mengatur mengenai transaksi di perusahaan penukaran aset kripto.

CEO Indodax Oscar Darmawan menyebutkan aturan aset kripto di Indonesia bisa dikatakan cukup detail dan diatur ketat. Hal itu dilakukan untuk memitigasi agar tidak terjadi fenomena seperti di Turki.

"Kita harus menyadari di Turki sendiri aturan kripto di sana masih tidak jelas, berbeda dengan di Indonesia," jelasnya.

Oscar menuturkan di Indonesia, sudah diatur standar keamanan yang tinggi dan aturan-aturan lain yang bertujuan melindungi masyarakat Indonesia yang melakukan investasi kripto.

Salah satunya, mengenai permodalan. Dia menyatakan Indonesia adalah salah satu negara yang paling ketat dalam mengatur aspek permodalan dibandingkan dengan negara lain.

Sebelumnya, Ketua Bappebti Sidharta Utama menyebutkan otoritasnya telah mewajibkan calon pedagang aset kripto yang terdaftar untuk menyampaikan catatan transaksi bulanan. Hal itu ditujukan untuk mengantisipasi adanya aksi penyelewengan dalam transaksi aset kripto.



Bisnis/Abdullah Azzam

CEO INDODAX Oscar Darmawan (*kiri*) berbincang dengan COO INDODAX Erdita Purnamasari di sela-sela peluncuran wajah baru Bitcoin Indonesia menjadi INDODAX (Indonesia Digital Asset Exchange) di Jakarta pada Rabu 14 Maret 2018.